

Perkembangan Hubungan Ekonomi Indonesia-AS Akhir-akhir Ini*

Suhadi MANGKUSUWONDO

Banyak sekali faktor yang mempengaruhi hubungan ekonomi Indonesia dan Amerika Serikat selama ini. Akhir-akhir ini ada dua peristiwa yang sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi di kedua negara dan mempengaruhi pula hubungan ekonominya dengan luar negeri.

Peristiwa pertama yang mempunyai konsekuensi luas bagi perkembangan ekonomi Amerika Serikat dan sangat mempengaruhi hubungan ekonomi luar negerinya, ialah defisit neraca berjalan yang meningkat selama beberapa tahun terakhir ini, dan munculnya AS sebagai negara pengimpor modal terbesar saat ini. Membengkaknya defisit neraca berjalan AS karena meningkatnya impor negara tersebut dan sangat meningkatnya arus modal ke negara itu, jelas mempunyai dampak pada arus barang maupun arus modal internasional. Dan, tidak urung hal itu telah pula mempunyai dampak pada perekonomian Indonesia.

Peristiwa kedua yang terjadi di Indonesia yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi di negeri ini dan hubungan ekonomi luar negerinya, ialah meningkatnya penerimaan minyak dalam dasawarsa tujuh-puluhan dan kemudian merosotnya harga dan penerimaan minyak pada awal tahun 1983. Akibat perkembangan itu, terjadi perubahan-perubahan yang penting dalam pola dan volume impor maupun investasi di Indonesia yang terasa pula pengaruhnya pada negara-negara lain termasuk AS.

*Makalah disampaikan pada *Konperensi Indonesia-Amerika*, yang diselenggarakan oleh Centre for Strategic and International Studies (Jakarta) dan Centre for Asia-Pacific Affairs, The Asia Foundation (San Fransisco), 12-14 Desember 1985 di Bali. Suhadi Mangkusuwondo adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Perdagangan. Makalah ini pernah dimuat di *Suara Karya*, 13, 14 dan 16 Desember 1985.

Dalam uraian berikut ini akan dibahas konsekuensi dari dua peristiwa penting tersebut terhadap hubungan ekonomi Indonesia-AS. Titik berat pembahasan akan diberikan pada hubungan perdagangan. Di samping itu akan disinggung sedikit pengaruhnya pada arus modal dan investasi antara kedua negara. Pada akhir tulisan ini akan ditinjau pengaruh kebijaksanaan yang ditempuh, baik oleh Pemerintah AS dalam menghadapi tuntutan proteksi yang berasal dari industri dalam negerinya maupun akibat kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran luar negerinya.

DEFISIT NERACA BERJALAN

Defisit neraca berjalan AS yang terus meningkat selama beberapa tahun terakhir ini karena melonjaknya impor di negara tersebut, telah dimanfaatkan oleh Indonesia, seperti juga oleh negara-negara lain, dengan menjual lebih banyak barangnya ke AS. Indonesia berhasil meningkatkan ekspornya cukup besar ke pasaran AS, sehingga perbaiki ekonomi Indonesia setelah mengalami resesi tahun 1982 terutama disebabkan oleh meningkatnya ekspor barang-barang ke luar negeri. Menurut perkiraan IMF misalnya, tahun 1982 sewaktu permintaan dalam negeri Indonesia naik dengan 6%, permintaan luar negeri telah merosot dengan 14,6% sehingga GDP secara keseluruhan dalam tahun tersebut menurun dengan 0,4%. Tetapi dalam tahun 1983 ekspor barang dan jasa naik dengan 7,1% bahkan tahun 1984 naik dengan 15,4%. Permintaan yang kuat dari luar negeri tersebut mendorong pertumbuhan GDP 5,1% dalam tahun 1983 dan 6,7% tahun 1984. Dari gambaran tersebut terlihat jelas bahwa *recovery* Indonesia selama tahun 1983/1984 adalah "export-led" dan salah satu pasaran yang terkuat bagi ekspor selama tahun-tahun itu adalah pasaran Amerika Serikat.

Ekspor non-migas Indonesia ke AS dalam tahun 1984 meningkat cukup besar mencapai 39,2%, sedangkan ke pasaran-pasaran utama lainnya yaitu Jepang hanya 6,2%, dan Singapura naik 4,7% (angka-angka Biro Pusat Statistik).

Kenaikan yang besar tersebut telah mengubah kedudukan pasaran utama ekspor non-migas Indonesia. Sebelum tahun 1984 pasaran utama ekspor non-migas Indonesia adalah Singapura, kedua adalah Jepang dan baru ketiga AS. Tahun 1984 urutan-urutannya terbalik, yaitu AS nomor satu, Singapura nomor dua, dan Jepang nomor tiga. Dengan demikian jelaslah betapa besarnya pengaruh perubahan neraca berjalan AS pada arah perdagangan luar negeri Indonesia.

Pengaruh lain dari perubahan neraca pembayaran luar negeri AS tersebut, yaitu sejak defisit neraca berjalan Amerika itu disertai dengan semakin

meningkatnya nilai tukar dollar AS terhadap mata uang asing lainnya, maka selama periode itu telah terjadi pergeseran arah ekspor Indonesia. Yang biasanya ditujukan ke Eropa dan negara-negara lain, banyak yang dialihkan ke pasaran AS. Salah satu akibatnya, yang mungkin dalam jangka panjang akan kurang menguntungkan, ialah banyak langganan-langganan lama di Eropa yang selama bertahun-tahun biasa mengimpor barang-barang dari Indonesia, misalnya pembeli pakaian jadi, kayu lapis, dan kopi, mengalami kesulitan mendapatkan barang-barang dari Indonesia oleh karena eksportir Indonesia lebih tertarik menjual barangnya ke AS. Kehilangan langganan-langganan tetap tersebut mungkin akan menimbulkan masalah apabila di kemudian hari kurs dollar kembali ke tingkat semula, karena tidak mudah bagi eksportir Indonesia untuk mendapatkan kembali langganan lama tersebut jika mereka sudah mengalihkan pembeliannya ke suplair dari negara lain.

Akibat lain dari membanjirnya impor AS ialah timbulnya desakan yang semakin kuat dari industri dalam negerinya untuk mendapatkan perlindungan berupa pembatasan-pembatasan impor. Contoh yang paling jelas adalah impor tekstil dan pakaian jadi. Indonesia telah merasakan dampak kecenderungan ini sejak tahun 1982, pada waktu beberapa kategori pakaian jadi Indonesia mulai dikenakan kuota. Sejak itu pembatasan-pembatasan terus meluas sehingga per 30 Juni 1985 sudah 34 kategori pakaian jadi dan tekstil terkena kuota ekspor ke Amerika Serikat.

Yang sangat merisaukan masyarakat akhir-akhir ini ialah adanya rancangan undang-undang (RUU) di AS yang dikenal dengan nama "Jenkins bill" dan "Thurmond bill." Meskipun Jenkins-Thurmond bill itu belum disahkan menjadi undang-undang, tetapi dampaknya sudah terasa. Karena RUU tersebut akan sangat membatasi kemungkinan masuknya ekspor tekstil Indonesia ke AS, maka telah timbul ketidakpastian, yang mengakibatkan sebagian pembeli di AS ragu-ragu untuk menutup kontrak pembelian jangka panjang tekstil Indonesia, menunggu sampai ada kepastian lebih lanjut mengenai RUU itu. Itulah sebabnya mengapa RUU itu sangat merisaukan kalangan pengusaha Indonesia.

Di pihak Pemerintah AS ada perasaan, tindakan proteksi yang dilakukannya terlalu dibesar-besarkan di Indonesia, karena kenyataan menunjukkan bahwa ekspor Indonesia termasuk ekspor tekstil dan pakaian jadi, terus meningkat dengan cukup pesat selama ini. Akan tetapi, "Jenkins-Thurmond bill" memang menyolok dan menarik perhatian kalangan luas di Indonesia, seperti juga di negara-negara lain, oleh karena sasarannya adalah negara-negara tertentu di Asia (11 dari 12 negara sasaran undang-undang tersebut adalah negara-negara di Asia). Oleh karena itu undang-undang tersebut dianggap sangat diskriminatif terhadap negara-negara pengeksport tekstil di Asia. De-

ngan sifat yang diskriminatif tersebut dirasa bahwa Dewan Perwakilan Rakyat AS telah mengabaikan salah satu prinsip yang pokok dari GATT, yaitu prinsip non-diskriminasi.

Hal serupa telah terjadi sebelumnya, yaitu dalam *countervailing duties proceeding* yang pernah dilancarkan oleh industri tekstil Amerika Serikat setahun yang lalu. Industri di AS waktu itu mengajukan petisi untuk mengenakan *countervailing duty* (bea masuk balasan) terhadap impor tekstil, terutama dari negara-negara pengekspor tekstil di Asia. Ini telah menimbulkan perasaan bahwa negara-negara Asia telah dijadikan korban pembatasan perdagangan sehingga tindakan *countervailing duty* (CVD) dianggap sangat berbau diskriminatif.

Langkah-langkah CVD dan RUU Jenkins dan Thurmond yang sangat ditentang oleh Indonesia maupun negara-negara Asia lainnya, sekaligus telah mengurangi kredibilitas AS di mata umum, khususnya dalam hubungannya dengan usaha Amerika Serikat yang ingin memulai suatu *New Round of Multilateral Trade Negotiations* (Ronde Baru Negosiasi Perdagangan Multilateral) dalam rangka GATT yang dimaksudkan untuk mempertahankan sistem perdagangan yang bebas dan non-diskriminatif. Usaha untuk mengurangi kemungkinan masuknya barang-barang ekspor negara-negara tertentu di Asia ini, dengan sendirinya mengurangi kepercayaan negara-negara di Asia mengenai kesungguhan AS dalam usaha mempertahankan sistem perdagangan multilateral yang tertuang dalam ketentuan-ketentuan GATT.

PENINGKATAN DAN PENURUNAN PENERIMAAN MINYAK DI INDONESIA

Di Indonesia telah terjadi perkembangan-perkembangan yang mempunyai dampak pada jalannya perekonomian negeri ini dan mempengaruhi hubungan ekonomi luar negerinya, termasuk hubungan ekonomi dengan AS. Kejadian yang terpenting ialah melonjaknya penerimaan yang berasal dari minyak yang terjadi dalam tahun 1973/1974 dan sekali lagi dalam tahun 1979/1980. Salah satu akibatnya ialah usaha-usaha pembangunan sangat meningkat selama dasawarsa 1970-an dan impor barang-barang modal maupun bahan-bahan baku untuk industri ikut meningkat dengan pesat.

Sebagai contoh, dalam tahun fiskal 1979 impor non-migas Indonesia naik dengan 13,3% dan tahun fiskal 1980 melonjak dengan 42,7%. Dalam tahun fiskal 1981, meskipun dunia telah mengalami resesi, impor Indonesia masih meningkat dengan 20,6% dan bahkan dalam tahun fiskal 1982, saat resesi mencapai keadaan yang terparah, impor Indonesia masih naik dengan 14,9%. Dalam tahun tersebut nilai impor Indonesia mencapai sekitar US\$18 milyar,

termasuk di dalamnya impor minyak sebesar kurang lebih US\$4 milyar. Jadi selama kurang lebih 10 tahun sejak tahun 1973/1974, Indonesia menjadi salah satu negara pengimpor yang semakin penting di dunia, dan banyak menyerap barang dan jasa dari luar negeri, terutama yang berasal dari negara-negara maju, termasuk di dalamnya barang-barang modal dan bahan baku untuk industri yang berasal dari AS.

Perlu dicatat kiranya, meskipun penerimaan dari minyak melonjak dalam dasawarsa 1970-an, Pemerintah Indonesia masih tetap melanjutkan kebijaksanaannya menarik modal pinjaman dan modal investasi dari luar negeri, terutama pinjaman bersyarat lunak melalui IGGI dan Bank Dunia maupun Bank Pembangunan Asia. Kebijakan ini sengaja ditempuh oleh Pemerintah Indonesia, dan kemudian ternyata bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang berpandangan jauh ke depan, karena dibenarkan oleh perkembangan. Sewaktu penerimaan minyak merosot dalam tahun 1983, Indonesia masih dapat melunakkan akibatnya karena dapat menarik pinjaman dengan syarat-syarat yang cukup lunak dari luar negeri. Walaupun demikian, Indonesia tidak dapat menghindari bahwa bagian yang semakin besar dari pinjaman luar negerinya harus dicari di pasaran modal bebas dengan syarat-syarat komersial biasa. Kalau dalam tahun fiskal 1980, 50% dari pinjaman luar negeri Indonesia berupa pinjaman lunak, maka pada tahun fiskal 1984 keadaannya sudah banyak berubah, yaitu 32,3% saja pinjaman tahun itu merupakan pinjaman konsesional, sisanya merupakan pinjaman dengan syarat-syarat semi konsesional, bahkan sebagian dengan syarat-syarat komersial biasa.

Dengan penerimaan minyak yang meningkat dan terus mengalirnya modal pinjaman dari luar negeri, selama tahun 1970-an Indonesia dapat terus meningkatkan impor barang modal maupun bahan baku guna meningkatkan investasi dalam proyek-proyek pembangunannya di samping memupuk cadangan devisa yang terus meningkat jumlahnya. Keadaannya mulai berubah sejak tahun fiskal 1981, pada waktu mana terdapat defisit di dalam neraca pembayaran. Keadaan serupa terjadi lagi dalam tahun fiskal 1982, yang merupakan tahun terberat bagi Indonesia. Dalam tahun tersebut terjadi aliran modal keluar (*capital outflow*) sebesar US\$3,3 milyar. Neraca berjalan menunjukkan defisit yang sangat besar, yaitu US\$6,8 milyar atau sekitar 7,6% dari GDP.

Defisit yang sedemikian besarnya tidak mungkin berlangsung terlalu lama. Dalam keadaan normal, defisit neraca berjalan Indonesia berada sekitar 3% dari GDP. Karena itu Pemerintah Indonesia melakukan tindakan-tindakan untuk mengembalikan keseimbangan eksterennya. Tindakan penyesuaian tersebut terutama berupa penekanan impor melalui devaluasi rupiah pada

awal tahun 1983, dan juga penjadwalan kembali beberapa proyek-proyek besar yang padat devisa. Akibatnya ialah bahwa untuk pertama kali setelah lebih sepuluh tahun, impor Indonesia mengalami penurunan dalam tahun fiskal 1983 sebesar 17,3% dan dalam tahun fiskal 1984 menurun sekitar 6%.

Penurunan impor Indonesia dengan sendirinya terasa oleh mitra dagang Indonesia, terutama negara-negara pengekspor utama di Asia seperti Jepang, Hongkong dan Taiwan, tetapi juga negara-negara mitra dagang di Eropa. Yang menarik ialah dalam tahun 1983 dan 1984 impor dari AS ternyata masih menunjukkan peningkatan, yaitu 4,8% dalam tahun 1983 dan 1,3% dalam tahun 1984 meskipun impor dari negara-negara lain mengalami penurunan. Impor dari Jepang misalnya, dalam tahun 1983 menurun dengan 12,8% dan sekali lagi dalam tahun 1984 menurun dengan persentase yang sama, yaitu 12,8%.

ARUS MASUK MODAL

Demikianlah beberapa pergeseran yang terjadi dalam hubungan perdagangan Indonesia-AS sebagai akibat kejadian-kejadian penting di kedua negara tersebut akhir-akhir ini. Selain dampaknya di bidang perdagangan, perkembangan dalam negeri AS maupun Indonesia mempunyai pula dampak pada bidang-bidang lain, termasuk arus modal di kedua negara.

Seperti dikemukakan di atas, dalam beberapa tahun terakhir ini AS telah berubah dari negara pengekspor modal menjadi pengimpor modal yang besar. Dampaknya terasa bagi negara-negara lain, khususnya bagi negara pengimpor modal seperti Indonesia. Negara-negara ini tersaingi oleh Amerika Serikat dalam menarik modal dari pasaran internasional. Indonesia selama ini masih berhasil untuk tetap mengimpor modal dengan syarat konsesional antara lain melalui forum IGGI. Negara pengekspor modal yang semakin penting bagi Indonesia tidak mengherankan adalah Jepang, negara yang paling banyak mempunyai kelebihan tabungan domestik saat ini. Selain berupa modal pemerintah, Indonesia tetap juga mengusahakan masuknya modal swasta baik berupa pinjaman maupun berupa penanaman modal langsung. Di sini keadaannya tidak begitu mudah, karena arus penanaman modal swasta banyak susut sejak resesi terjadi dan banyak modal mengalir ke AS. Pemerintah Indonesia harus melakukan usaha-usaha tambahan untuk menarik terus investasi dari luar, apabila Indonesia menginginkan terus berlangsungnya investasi luar negeri seperti tahun-tahun sebelum resesi.

Daya tarik AS bagi modal luar negeri mungkin telah pula mempengaruhi arus modal swasta Indonesia. Diperkirakan bahwa sebagian modal milik orang Indonesia ada pula yang mengalir ke AS untuk ditanam di sana, baik

berupa pembelian saham-saham maupun dalam usaha industri dan real estate. Semua ini berarti, Indonesia tidak luput dari pengaruh munculnya AS sebagai pengimpor modal, dan seperti juga negara-negara lain yang harus berusaha lebih keras untuk mendapatkan sebagian dari modal internasional untuk membiayai pembangunan nasional.

SUKU BUNGA

Tingkat suku bunga yang tinggi di Amerika Serikat mempunyai pengaruh yang tidak terhindarkan pula pada Indonesia. Misalnya beban kewajiban membayar hutang dan bunga menjadi semakin berat, meski selama ini Indonesia masih berhasil untuk mempertahankan beban hutang dalam batas-batas yang masih bisa dibenarkan. Tetapi peningkatan beban hutang Indonesia dalam tahun-tahun terakhir ini tidak dapat dielakkan. Kalau dalam tahun fiskal 1980 *debt-service ratio* Indonesia terhadap *net* ekspor baru 10,6%, maka rasio tersebut dalam tahun fiskal 1984 telah mencapai 22%. Ini berarti bahwa Indonesia sudah mencapai batas di mana tidak dapat lagi meningkatkan beban hutang luar negerinya tanpa membahayakan kedudukan eksternalnya.

Segi lain dari akibat tingginya suku bunga di AS ini di Indonesia adalah tingkat suku bunga bank meningkat. Apalagi Indonesia menerapkan sistem devisa bebas, sehingga tidak mudah diharapkan bahwa suku bunga di Indonesia akan menurun apabila suku bunga di luar negeri masih tinggi. Pada awal 1985 misalnya, suku bunga pinjaman bank-bank swasta di Indonesia berkisar sekitar 21-32%. Suku bunga yang cukup tinggi ini dengan sendirinya menyebabkan investasi swasta tertekan. Ini berarti, selama suku bunga masih tinggi di luar negeri, selama itu pula Indonesia masih akan menghadapi masalah bagaimana mendorong investasi swasta dalam negeri.

Secara keseluruhan menjadi jelas, bahwa perkembangan akhir-akhir ini di AS di satu pihak menguntungkan bagi Indonesia seperti meningkatnya pasaran ekspor Indonesia di negara tersebut, tetapi di lain pihak ada pula dampak-dampak yang kurang menguntungkan misalnya semakin sulitnya menarik penanaman modal swasta ke Indonesia dan semakin beratnya beban hutang sebagai akibat tingginya tingkat bunga di Amerika Serikat.

KEBIJAKAN PEMERINTAH TAHUN-TAHUN MENDATANG

Apa yang akan kita hadapi dalam tahun-tahun mendatang ini? Pemerintah AS di bawah Presiden Reagan tampaknya berusaha keras untuk membendung tekanan yang datang dari industri dalam negeri untuk memperluas proteksi. Bersamaan dengan itu, Pemerintah Reagan menekan negara-negara mitra

dagangnya untuk lebih membuka pasarannya bagi barang-barang ekspor AS. Sasaran utamanya adalah Jepang, di samping Eropa yang dianggap banyak memberikan subsidi bagi produk pertaniannya. Negara-negara sedang berkembang, terutama negara-negara sedang berkembang berpendapatan menengah di Asia, juga mendapat tekanan dari AS supaya lebih membuka pasarnya masing-masing.

Dalam *policy statement*-nya (23 September 1985), Pemerintah Amerika Serikat mendesak negara-negara lain untuk ikut mempertahankan sistem perdagangan internasional yang "open, free and fair" (terbuka, bebas, dan jujur). Dalam pernyataan yang sama dinyatakan juga bahwa "open and free trade system" di AS selama ini telah menghasilkan perkembangan ekonomi yang jauh lebih baik daripada negara-negara lain yang lebih proteksionistis. Desakan AS supaya negara-negara lain juga membuka pasarannya dapat dimengerti jika didasarkan pada pertimbangan, dengan demikian volume perdagangan internasional akan lebih besar, dan ini akan menguntungkan bagi semua negara. Akan tetapi, seandainya negara-negara lain tidak membuka atau tidak cukup membuka pasarnya, masih diragukan apakah AS akan tetap menjalankan *Open Trade Policy* meski selama ini pemerintahnya mengatakan bahwa kebijakan ini telah menguntungkan perekonomian AS.

Kesan yang kita dapat dari pernyataan AS tersebut ialah, jika negara-negara lain tidak mengurangi proteksi, maka Pemerintah AS akan menjalankan proteksi yang lebih luas. Jadi, ada semacam inkonsistensi dalam posisi AS ini. Di satu pihak Pemerintah AS yakin kebijakan yang dianut selama ini adalah benar, tetapi di lain pihak tampaknya ada suatu niatan untuk mengubah kebijakannya apabila negara-negara lain tidak mengikutinya.

Dalam usahanya untuk menekan negara-negara lain agar lebih membuka pasarnya masing-masing, *US Trade Representative* telah menyusun laporan mengenai restriksi perdagangan yang terdapat di negara-negara mitra dagang Amerika, termasuk Indonesia. AS akan mendesak pembatasan perdagangan ini agar dikurangi atau dihapus. Untuk Indonesia misalnya, tercantum dalam laporan itu, hambatan-hambatan perdagangan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia yang akan diusulkan dikurangi, seperti pembatasan impor buah-buahan segar dan pesawat terbang, tetapi termasuk juga pembatasan impor gula *confectionary* (nilai impor dari Amerika Serikat tahun 1984 US\$183,000), coklat *confectionary* (US\$46,000) dan *almonds* (US\$51,000).

Dapat diperkirakan dalam tahun-tahun mendatang tekanan dari AS kepada negara-negara yang lain untuk membuka pasarnya masing-masing dan untuk lebih menerapkan perdagangan yang jujur akan makin terasa. Pertanyaan yang timbul ialah apa yang diartikan dengan *fair trade*. Orang dapat mengerti apabila perdagangan yang jujur mencakup hal-hal seperti subsidi

ekspor dan pembatasan-pembatasan impor yang diskriminatif. Akan tetapi, negara-negara sedang berkembang menjadi tidak mengerti apabila ekspor tekstil atau pakaian jadi mereka dianggap tidak *fair* karena di negara-negara ini tingkat upah buruhnya rendah, jauh lebih rendah dari upah buruh di AS. Padahal perbedaan faktor *endowments* tiap-tiap negara dan perbedaan harga faktor produksi justru merupakan landasan bagi adanya perdagangan internasional.

Pengaruh AS di masa mendatang akan terasa pula melalui lembaga-lembaga internasional seperti misalnya *International Monetary Fund* (IMF-Dana Moneter Internasional) dan Bank Dunia. Melalui IMF misalnya, Pemerintah AS akan berusaha agar negara-negara sedang berkembang lebih banyak menerapkan kebijakan perdagangan bebas sebagai persyaratan bantuan badan itu. Ini terutama akan dirasakan oleh negara-negara yang menghadapi krisis hutang luar negerinya dan memerlukan sekali bantuan dari IMF.

Indonesia, meski tidak mengalami krisis hutang luar negeri, merasakan pula desakan-desakan semacam itu melalui badan internasional ini. Demikian pula dengan Bank Dunia. Negara-negara sedang berkembang yang banyak memerlukan bantuan Bank Dunia mengalami tekanan untuk lebih banyak memberikan peranan kepada sektor swasta di dalam pembangunan ekonomi. Negara-negara sedang berkembang yang memerlukan bantuan Bank Dunia akan merasakan adanya desakan untuk lebih banyak menggunakan kekuatan pasar dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan mengurangi pengaturan oleh pemerintahnya. Tekanan-tekanan semacam itu pasti akan terasa pula melalui lembaga-lembaga internasional lainnya, seperti misalnya Asian Development Bank (Bank Pembangunan Asia), dan bank-bank pembangunan regional lainnya, di mana Amerika Serikat mempunyai peranan yang cukup besar.

Bagaimana kira-kira perkembangan di Indonesia dalam waktu dekat ini? Salah satu pengaruh dari resesi tahun 1982 ialah makin kuatnya desakan industri dalam negeri untuk memperluas proteksi. Desakan itu disebabkan pertama-tama karena menurunnya permintaan pasar, baik pasaran dalam negeri maupun pasaran ekspor, dan lemahnya daya saing industri dalam negeri. Kedua, desakan timbul karena kekhawatiran menghadapi *dumping* barang-barang dari luar negeri yang dapat merusak pasaran. Di samping itu, bea masuk yang berlaku, dirasakan kurang efektif, sehingga industri dalam negeri sering tersaingi kurang wajar oleh barang-barang impor. Dalam keadaan seperti itu perlindungan terhadap industri dalam negeri semakin meluas, dan yang banyak dipakai adalah instrumen non-tarif, khususnya berupa lisensi impor dan kuota. Sewaktu kuota ditetapkan untuk membatasi impor,

pada mulanya tindakan tersebut dimaksudkan bersifat sementara (dua tahun), tetapi akhir-akhir ini semakin banyak desakan dari industri dalam negeri untuk tidak menghapus pembatasan-pembatasan kuantitatif tersebut.

Dengan demikian, Indonesia saat ini berada pada suatu persimpangan jalan, yaitu menghadapi pilihan apakah akan meneruskan kebijakan impor yang protektif ataupun berangsur-angsur kembali kepada keadaan perdagangan yang lebih kompetitif. Sulit untuk meramalkan jalan mana yang akhirnya akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia, namun menurut pengamatan penulis, suara terbanyak di Indonesia sekarang ini tidak menghendaki Indonesia berpaling ke dalam, menjauhkan diri dari pergaulan ekonomi internasional, menutup diri terhadap lalu-lintas modal, barang dan jasa-jasa dengan dunia luar. Pendapat umum semakin kuat bahwa Indonesia harus menghadapi tantangan-tantangan yang datang dari luar dengan jalan memperkuat industri dalam negeri, memperbaiki efisiensi, dan meningkatkan daya saing.

Jelas bahwa soal ini bukan merupakan soal yang mudah. Diperlukan antara lain restrukturisasi industri dalam negeri untuk membuat mereka menjadi kompetitif. Restrukturisasi industri di Indonesia diharapkan tidak sesulit di beberapa negara lain, mengingat industri yang ada belum terlanjur berkarat seperti di beberapa negara lain, sehingga relatif lebih mudah untuk mengadakan perombakan-perombakan struktur. Juga jelas bahwa usaha ini memerlukan bantuan dari pemerintah. Pemerintah perlu membantu industri yang akan mengalihkan usahanya ke bidang-bidang baru, ataupun industri yang akan mengadakan pembaharuan mesin dan peralatan lainnya. Dan, jelas pula bahwa proses penyesuaian industri dalam negeri akan memakan waktu.

Di tahun-tahun mendatang ini Indonesia dan Amerika Serikat akan dihadapkan pada masalah-masalah yang cukup rumit dan peka. Diperlukan kewaspadaan untuk menghindari benturan-benturan dan untuk merintis sistem kerjasama yang saling menguntungkan bagi pembangunan jangka panjang kedua negara.

Strategi "Asset Building" sebagai Alat Pertumbuhan Kurang Dianut Lagi oleh Sektor Perbankan Internasional?

J. PANGLAYKIM

PERILAKU DALAM MASA RESESI

Salah satu dampak resesi yang sampai saat ini masih berkelanjutan tampak pada perilaku dan moral para pelaku, baik petugas maupun debitur, dalam sektor perbankan. Di antara mereka ada yang tetap berpegang teguh pada prinsip, ketertiban, dan disiplin perbankan, dan integritas mereka sebagai petugas bank dan/atau nasabah bank, ada pula yang bersikap "santai" bahkan lebih santai daripada petugas bank itu sendiri terutama para debitur besar bank-bank negara karena mereka berpendapat bahwa pinjaman mereka sudah demikian besar sehingga yang akan pusing adalah petugas-petugas bank. Suatu sikap yang tidak terpuji sama sekali.

Dengan kata lain, resesi telah menimbulkan intensitas perilaku yang berbeda-beda di antara para pelaku dalam sektor perbankan. Oleh karena itu pelaku dalam bisnis perlu melakukan introspeksi mengenai dampak yang ditimbulkan oleh resesi yang belum dapat diramalkan akan berakhir ini, organisasi dan kesatuan yang terdapat di dalam lingkungan kita dan pada sektor perbankan khususnya.

Dari suatu survei atas kesulitan-kesulitan yang mungkin sedang dan akan kita hadapi sebagai akibat resesi tersebut, terdapat beberapa aspek yang menurut kami cukup memprihatinkan. Tetapi tentu saja apa yang akan kami ajukan di bawah ini belum tentu dapat diterima/disetujui oleh para pembaca karena di sana-sini masih terdapat kekurangan dan masih perlu diteliti lebih lanjut. Salah satu aspek yang akan kami kemukakan ialah:

POLA SUMBER DANA (FUND-BASE) BANK-BANK NASIONAL

Dalam pembahasan ini tidak termasuk bank-bank negara yang memiliki pola sumber dana yang lebih luas daripada pola sumber dana bank-bank

swasta meskipun mungkin sudah ada di antara bank-bank nasional swasta ada yang memiliki sumber dana yang lebih luas.

Umumnya sumber dana bank-bank swasta ialah modal setor dan cadangan, dana yang disetor oleh pihak ketiga/publik dalam bentuk giro dan/atau deposito, dan mungkin dana simpanan. Dari tiga sumber dana tersebut, dana dalam bentuk deposito terlihat membesar terutama setelah diadakan deregulasi pada tahun 1983. Tetapi jumlah dana yang disimpan oleh publik pada bank-bank swasta dalam bentuk deposito masih sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah deposito pada bank-bank negara. Ini mau atau tidak mau harus diakui bahwa bank-bank negara, meskipun bunga deposito di bawah bunga deposito yang dapat diberikan oleh bank-bank swasta, masih tetap lebih disukai oleh publik. Publik bagaimanapun masih lebih percaya kepada lembaga pemerintah. Ini merupakan fakta!

Jumlah deposito dan giro dapat digunakan oleh bank sebagai dasar untuk memberi pinjaman. Dengan menciutnya jumlah giro pada bank-bank swasta maka mereka harus dapat membuat semacam perhitungan kemampuan mereka memberikan pelayanan (baca: pinjaman) kepada publik (catatan: kami mendengar bahwa beberapa bank sudah mengeluarkan semacam sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan). Karena sumber dana bank-bank swasta yang menjadi dasar operasi mereka dapat dikatakan belum mantap, maka kita tetap membayangkan apa yang akan mereka alami bila dalam masyarakat terdengar isu-isu di bidang moneter. Dengan mendadak dan ini telah terjadi berkali-kali para deposan dan nasabah tanpa segan-segan menarik dana mereka dan mengalihkannya ke mata uang yang dianggapnya lebih "aman" (umumnya mereka "memarkirkan" dana mereka dalam dollar Amerika). Dengan dasar sumber dana yang mudah goyah itu, strategi pertumbuhan yang ditempuh oleh para pemimpin bank akan menghadapi aspek-aspek yang sulit.

"ASSET BUILDING" IDENTIK DENGAN PERTUMBUHAN?

Dalam beberapa tahun terakhir terlihat kecenderungan sektor perbankan, khususnya perbankan swasta, untuk memperlihatkan keberhasilan mereka dengan besarnya pinjaman portofolio yang mereka berikan ("asset building"). Semakin besar angka tersebut (baca: perkembangan/pertumbuhan), sebuah bank akan dilihat semakin berhasil dan lebih sehat. "Trend" ke arah "asset building" mungkin dilakukan atas dasar "administrative transaction" dan bukan atas dasar "real." Kecenderungan ini terlihat juga dalam sektor perbankan di Amerika. Namun dewasa ini kecenderungan tidak lagi ke arah asset bulding akan tetapi ke arah konsolidasi dan kegiatan-kegiatan yang lebih solid. Namun demikian kecenderungan itu tidak meremehkan bank berukuran "menengah" dan kecil.¹

¹Lihat *A W J J*, Desember 1985.

Aspek penting lain ialah kecenderungan bank-bank mengikuti lembaga-lembaga keuangan bukan bank-bank untuk memiliki asset-asset dalam bentuk gedung perkantoran, anak-anak perusahaan diversifikasi dan sebagainya seperti yang dilakukan oleh Pan Electric (sebelumnya ialah Carrion), OTB, misalnya. Dengan memiliki gedung perkantoran megah, diversifikasi dan sebagainya sebagai asset-asset mereka, tampak berhasil memperoleh jalur-jalur kredit dari puluhan bank-bank terkenal. Continental Illinois dan Crocker Bank misalnya merupakan salah satu contoh menarik dari sektor perbankan.

Dalam kaitan di atas, mungkin kita dapat mengajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri, apakah strategi "asset building" seolah-olah bank dianggap seperti keberhasilan dalam pertumbuhan, merupakan strategi yang tepat, apalagi bila kita menyadari dasar sumber dana bank kita yang masih rapuh? Bukankah lebih baik bila bank-bank swasta memperkokoh dasar sumber dana mereka terlebih dahulu (bila mungkin)? Seandainya perbankan swasta dapat memperlebar dasar sumber dana mereka niscaya strategi "asset building" sebagai alat perkembangan akan harus ditinjau kembali! Seandainya bank-bank dapat mengeluarkan surat hutang (bond) untuk jangka waktu, katakan, 10 tahun atas dasar suku bunga mengambang (floating) dan kepada pembeli surat hutang itu diberikan semacam "tax holiday" misalnya, bukankah sumber dana tersebut akan merupakan bahan pertimbangan menarik?

Aspek penting lain untuk memperkuat dasar sumber dana bank-bank swasta ialah memperbesar modal bank. Dalam praktek sebagian besar dana para pemegang saham sudah tertanam dalam asset tetap (fixed asset) seperti gedung perkantoran misalnya. Dewasa ini memang terdapat citra bahwa pertumbuhan sebuah bank dilihat/diukur dari gedung perkantornya yang representatif; bank yang sehat tercermin dari kantor yang "serba wah" yang mengundang rasa kagum orang. Pandangan seperti itu bukan saja terdapat di kalangan nasabah, pekerja dan staf, tetapi juga di kalangan para pemimpin bank itu. Bila memang sebuah bank memutuskan menempatkan kantornya di daerah yang mempunyai "kelas" tertentu, seharusnya modal bank itu juga ditingkatkan! Ada juga yang menggunakan cara-cara administratif sehingga tidak terkena "capital ratio" itu.

DEPOSAN

Kecuali mungkin para deposan pada bank-bank pemerintah deposan-deposan pada bank-bank swasta umumnya mempunyai "hidung" yang sangat tajam dan peka. Mereka umumnya merupakan individu-individu yang mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup baik, mengetahui dan mengikuti perkembangan bisnis, "lihai" bermain-main dengan angka-angka, dan dapat

membuat perkiraan mengenai situasi moneter, serta memiliki pengalaman yang cukup banyak. Oleh karena itu perilaku/sikap mereka penting kita ketahui sebelumnya dan sebaiknya dapat diperkirakan. Desas-desus di bidang moneter cukup mendorong mereka menarik dana mereka dan mendollarkannya. Umumnya para deposan itu memperoleh "margin" lebih besar bilamana menyimpan daripada margin yang diperoleh bank. Para deposan dapat dikatakan hanya mempunyai sedikit risiko dibandingkan dengan bank, apalagi dalam suasana bisnis yang sedang dilanda resesi ini. Bank-bank harus lebih berhati-hati memberikan pinjaman. Dengan kata lain, bank-bank tidak dapat mengharapkan "loyalitas" para deposannya.

Mungkin kita dapat meringankan beban bank bila bank menerima deposito jangka panjang dan dapat memberikan perangsang kepada para deposan itu dalam bentuk keringanan pajak dari pemerintah (misalnya untuk deposito lima tahun diberi tax insentif) atau bila lembaga-lembaga pemerintah diperbolehkan menyalurkan dana-dananya kepada bank-bank swasta. Tetapi pilihan kedua sangat mustahil dilakukan karena hal tersebut dapat mengancam kestabilan pola dan dasar sumber dana bank-bank pemerintah. Dilihat dari sudut deregulasi perbankan tahun 1983, pilihan kedua itu akan dapat menciptakan suasana bersaing yang sehat antara bank-bank pemerintah dan bank-bank swasta untuk pada gilirannya menciptakan kapabilitas dan kapasitas bersaing yang lebih tinggi. Meski bagaimanapun bank-bank pemerintah akan tetap lebih unggul daripada bank-bank swasta.

NASABAH DAN DEBITUR

Seperti kita telah ketahui, nasabah yang menyimpan dananya dalam bentuk giro akhir-akhir ini cenderung memindahkan dananya ke deposito, meski masih banyak bank yang dapat menarik dana dalam bentuk giro dalam jumlah yang relatif lumayan besar. Nasabah-nasabah tersebut merupakan debitur atau mempunyai hubungan hutang-piutang dengan bank-bank tersebut. Ada pula kelompok usaha pemilik bank. Pemilik bank berargumentasi apa salahnya memberikan kredit kepada anak perusahaan atau sesama perusahaan dalam kelompok usaha sendiri. Perusahaan-perusahaan itu toh membayar bunga atas pinjaman itu dan berada di bawah pengawasannya. Tetapi dalam praktek suku bunga yang dibebankan kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok usaha itu ditentukan berdasarkan "konsesi" dan pemberian lain-lain fasilitas. Pemberian kredit kepada perusahaan-perusahaan yang berada di dalam satu kelompok usaha dengan beberapa pemegang saham, biasanya dapat menimbulkan ketegangan di antara mereka sendiri. Bank sentral dan lembaga-lembaga keuangan yang mewakili kepentingan publik melihat pemberian kredit kepada perusahaan-perusahaan di dalam satu kelompok usaha sebagai hal yang lambat-laun harus diperkecil.

Sebenarnya para peminjam dana berasal dari berbagai kegiatan seperti produsen, pabrikan, perdagangan, misalnya. Usaha-usaha yang benar-benar mempunyai itikad baik sering dihadapkan kepada masalah dari keterlambatan/kemacetan pembayaran sampai permintaan penataan kembali pengembalian pinjaman dan pembayaran bunganya dari para penyalur mereka. Di antara para penyalur itu memang ada yang mempunyai itikad nakal. Mereka dengan sengaja tidak atau memperlambat pembayaran mereka kepada produsen. Para produsen di pihak lain yang meminjam dana dari bank, lambat-laun kewalahan sehingga akhirnya mereka mau atau tidak mau harus mengalami kesulitan "cash flow." Di antara mereka ada yang dengan sejujurnya mengatakan ketidakanggupan mereka mengembalikan pinjaman dan membayar bunga pinjamannya, tetapi ada pula yang diam-diam "menghilang." Pada gilirannya, bank-bank swasta harus menghadapi debitur yang meskipun memiliki itikad baik tetapi sementara tidak dapat memenuhi komitmen mereka kepada bank. Debitur yang memang "nakal" menggunakan situasi bisnis tersebut sebagai alasan menghindari komitmen mereka kepada bank. Demikianlah situasi bisnis akhir-akhir ini.

Bank-bank menghadapi suatu dilema, di satu pihak penarikan deposito, di pihak lain harus lebih selektif memberikan pinjaman. Nasabah potensial dan beritikad baik bagaimanapun masih ada dan harus mendapat bantuan meskipun pada mulanya pengembalian pinjaman dan pembayaran bunganya mungkin agak tersendat-sendat.

Sampai berapa lamakah ini akan berlangsung? Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh bank-bank mungkin akan tercermin pada laporan keuangan mereka tahun 1985. Bank yang dapat "survive" akan sangat bergantung kepada jumlah cadangan dana mereka untuk menutup keterlambatan/kemacetan pengembalian pinjaman dan pembayaran bunga para debiturnya.

Para pemilik kelompok-kelompok usaha tidak selalu memberikan fasilitas kepada perusahaan-perusahaan di dalam kelompok usahanya. Ada juga yang cenderung meminjam dana-dana "off-shore" dan/atau bank-bank asing yang beroperasi di Jakarta. Fasilitas ini tentu saja tidak memberikan keuntungan langsung kepada bank-bank mereka. Tetapi secara tidak langsung pemberian kredit dan fasilitas itu membuktikan adanya hubungan erat antara pemimpin kelompok usaha itu dengan para pemimpin bank-bank asing.

PEMILIK DAN PENGARUH LINGKUNGAN

Kenyataan bahwa sebagian besar bank swasta nasional memiliki tokoh-tokoh terkenal/terpandang serta pemilik mayoritas di kalangan masyarakat bisnis sebagai pucuk pimpinan, memberikan semacam "jaminan" atau "rasa

aman" kepada para deposan. Aspek ini perlu mendapat perhatian lebih besar. Karena tanpa nama tertentu yang sudah dikenal oleh masyarakat, niscaya deposan akan "lari" dan merasa lebih aman memarkirkan dananya pada bank-bank pemerintah.

Angka-angka terakhir pemberian kredit adalah sebagai berikut:²

1. Bank Indonesia	14,9 %
2. Bank Umum Pemerintah	64,99%
3. Bank Swasta Nasional	12,62%
4. Bank Pembangunan Daerah	2,69%
5. Bank Asing	5,41%

Dari angka-angka itu yang menarik ialah turunnya persentase pinjaman yang diberikan oleh bank-bank asing. Penurunan itu mungkin disebabkan para debitur lebih condong meminjam dalam rupiah.

STAF DAN PEMIMPIN BANK-BANK SWASTA NASIONAL

Salah satu kesulitan yang sedang dan akan dihadapi oleh bank-bank swasta yang dewasa ini sedang berada dalam proses pengembangan ialah masalah perekrutan petugas-petugas yang dapat menangani berbagai kegiatan perbankan. Merekrut tenaga-tenaga dari berbagai sumber seperti Bank Indonesia, bank-bank swasta dan asing, lembaga-lembaga keuangan non-bank, para lulusan akademi dan universitas, akan menghasilkan suatu kelompok tenaga ahli yang beraneka ragam latar belakang, kepandaian, pengalaman, persepsi, dan harapan misalnya. Kita dapat membayangkan kesulitan yang akan dihadapi oleh bank-bank menciptakan suatu tim yang mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan para pemilik/pemegang saham dan pucuk pimpinan. Bank-bank swasta nasional harus mampu menciptakan suatu "corporate culture" yang dapat diterima agar pada gilirannya dapat terpupuk loyalitas kepada organisasi yang baru mereka masuki itu. Dalam kaitan ini akan terjadi proses penyesuaian diri antara para petugas yang lama dan pimpinan bank di satu pihak dan para pendatang baru yang masih muda baik dalam penampilan maupun dalam pengalaman di pihak lain. Para petugas lama harus bersedia menyesuaikan diri dengan proses yang lebih modern dalam pengambilan keputusan misalnya. Sebab kadang-kadang para petugas lama dalam pengambilan keputusan lebih memperhatikan aspek-aspek pribadi dan laporan keuangan yang sebenarnya kurang mempunyai bobot, sedangkan

²Laporan Mingguan Bank Indonesia, 1 Agustus 1985. Angka-angka di atas diambil rata-rata selama empat tahun dari tahun 1981 sampai April 1985.

petugas baru akan lebih menekankan kepada rasio, kuantitas, angka-angka, penampilan misalnya. Mereka yang mengetahui seluk-beluk bisnis tentu akan berpendapat bahwa laporan keuangan dibuat semata-mata untuk keperluan mendapatkan pinjaman sehingga angka-angkanya dapat "didisain" sedemikian rupa agar dapat memenuhi selera sang pemberi pinjaman.

Penyesuaian tadi memerlukan aspek-aspek "take and give" antara para pemimpin tradisional dan mereka yang mendapat pendidikan modern dalam manajemen perbankan. Tentu saja proses itu tidak dapat dilaksanakan dalam waktu singkat, tetapi kami telah melihat proses penyesuaian itu dalam manajemen beberapa bank modern dilaksanakan secara konsekuen.

Perlu dicatat di sini bahwa seorang lulusan universitas dengan rentetan gelar belum tentu adalah bankir yang dapat mencari bisnis, justru pemilik-pemilik tanpa "embel-embelan" adalah para "bank builders."

IKHTISAR

Kertas kerja ini dimaksudkan sebagai bahan masukan yang bersifat makro dan sementara. Kami telah mengemukakan aspek-aspek pokok yang perlu mendapat perhatian seperti: (a) perilaku para pelaku petugas dan debitur dalam bidang perbankan dalam suasana bisnis yang masih dilanda oleh resesi ini; (b) pola sumber dana bank-bank swasta, yang menurut pendapat kami masih belum mantap, sempit ruang lingkupnya, dan terdapat kelompok yang berorientasi ke "asset building" melalui "administrative transaction." Dalam kaitan tersebut perlu dipertanyakan apakah strategi pertumbuhan bank melalui strategi "administrative asset building" itu sebagai cermin sehatnya bank yang bersangkutan, masih dapat dipertahankan?; (c) para deposan yang semakin pandai dan sangat berhati-hati; (d) kesulitan yang dihadapi oleh bank-bank dalam menghadapi para debitur. Ada yang mempunyai itikad baik maupun yang nakal, yang lagi-lagi karena resesi, menyebabkan pada gilirannya bank-bank swasta harus bersikap lebih luwes kepada mereka; (e) pemilik-pemilik bank yang lebih suka meminjam off-shore atau dari bank-bank asing untuk anggota kelompok usahanya; dan (f) aspek positif yang ditimbulkan oleh orang-orang terkemuka dalam masyarakat yang duduk sebagai pemimpin bank; serta (g) kesulitan bank-bank merekrut tenaga-tenaga ahli yang loyal dan berdedikasi karena perbedaan latar belakang pendidikan, persepsi, pengalaman misalnya dan proses penyesuaian antara para pemimpin lama dan tenaga-tenaga ahli baru. Pemilikan gelar belum tentu membuat ia seorang wirausaha, justru sebagian besar wirausaha tak memiliki embel-embel sarjana.

ANALISA TAHUN XIV, 1985
1. MASALAH EKONOMI YANG RUMIT DAN PEMECAHANNYA

- J. PANGLAYKIM, *Era Pasca-Minyak Identik dengan Strategi Ekspor Nasional?*
- Engellna PATTIASINA, *Hukum Persaingan sebagai Alat Kontrol Konsentrasi Ekonomi: Suatu Dilema Pembangunan Nasional?*
- Pande Radja SILALAH, *RAPBN 1985/1986: Tantangan dan Harapan yang Diciptakannya*
- J. PANGLAYKIM, *Beberapa Cuplikan Kehidupan Berusaha*
- Djijsman S. SIMANDJUNTAK, *Kontribusi SBPU bagi Manajemen Likuiditas*
- Pande Radja SILALAH, *Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia*
- Lynn E. BROWNE, *Pertentangan Pendapat Mengenai Kemajuan Teknologi*

2. PERKEMBANGAN DEMOKRASI DAN POLITIK INDONESIA

- M. DJADIJONO, *Mentradisikan Mekanisme Musyawarah-Mupakat*
- Sunarto NDARU MURSITO, *Demokrasi Pancasila Mengembangkan Kesejahteraan Umum Menyeluruh*
- BABARI, *Masa Mengambang dan Partisipasinya dalam Pelaksanaan Pembangunan Nasional*
- Tommi LEGOWO, *Memahami Tingkah-Laku Politik di Sektor Non-Formal*
- Jusuf WANANDI, *Politik Dalam Negeri dan Kaitannya dengan Kebijakan Luar Negeri Indonesia*
- Donald K. EMMERSON, *Politik Luar Negeri Indonesia: Suatu Penilaian Kembali Secara Introspektif*
- SUKANTO, *Perspektif Kaderisasi Partai Politik dan Golongan Karya*

3. MENGGALAKKAN KEGIATAN EKONOMI

- J. PANGLAYKIM, *Pasar Jepang yang Tertutup akan Terbuka Melalui Kerjasama dengan Sogo Shosha?*
- Rin Purwani BUDI, *Perubahan Struktural Produksi dan Perdagangan Indonesia: Sebuah Pandangan*
- Murwatie B. RAHARDJO, *Sektor Informal dan Ketenagakerjaan di Indonesia*
- Michael B. SOEBAGYO, *Perdagangan Imbal-Beli dan Ekspor Non-Migas*
- J. PANGLAYKIM, *Industri Perbankan Mencari Mekanisme yang Unggul dalam Lingkungan Bisnis yang terus Berubah-ubah*
- Sunarto NDARU MURSITO, *Budidaya Peternakan Rakyat: Faktor Strategis untuk Pembangunan Pedesaan*
- Sudarsono HARDJOSOEKARTO, *Kebijakan Pangan Indonesia: Belajar dari Keberhasilan*

4. ASIA-AFRIKA DAN PERKEMBANGAN KAWASAN

- H. Roeslan ABDULGANI, *Sekitar Konperensi Asia-Afrika dan Maknanya bagi Politik Luar Negeri Indonesia*
- Djisman S. SIMANDJUNTAK, *Bandung dan Evolusi Tata Ekonomi Internasional Baru*
- SUKANTO, *Perjuangan Menuju Tata Informasi Dunia Baru*
- Hadi SOESASTRO, *Hubungan Ekonomi ASEAN-Amerika Serikat*
- Sabam SIAGIAN, *Potensi Konflik dan Perdamaian di Asia Tenggara*
- Asnani USMAN, *Negara-negara Besar dan Konflik Kampuchea*
- Endi RUKMO, *Hubungan Cina-Soviet: Hambatan-hambatan dan Prospeknya*

5. PENDIDIKAN DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT

- BABARI, *Sekolah Menengah Kejuruan dan Masalahnya*
- Iwan P. HUTAJULU, *Universitas Terbuka dan Tantangan Belajar Mandiri*
- M. Bambang WALGITO, *Pendidikan Luar Sekolah Menyambut Masyarakat Belajar*
- C.P.F. LUHULIMA, *Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Peranan Perancis: Pendekatan Pendidikan*
- Sunarto NDARU MURSITO, *Keluarga Berencana Membangun Kualitas Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat*
- Medelina KUSHARWANTI, *Komunikasi dalam Proses Kesatuan dan Persatuan Bangsa*

6. PENGALAKAN EKSPOR DAN MUNCULNYA KELAS MENENGAH

- Hadi SOESASTRO, *Amerika Serikat sebagai Pasar Ekspor Non-Migas Indonesia*
- Michael B. SOEBAGYO, *Ekspor Gas Alam Indonesia ke Jepang*
- Djisman S. SIMANDJUNTAK, *Negara Berkembang dan Babak Baru GATT*
- H. Haryo ASWICAHYONO, *Kebijakan Ilmu dan Teknologi*
- SUKANTO, *Kelas Menengah di Indonesia: Suatu Tinjauan Kepustakaan*
- Nancy K. SUHUT, *Kelas Menengah di Indonesia: Tinjauan Sosial Ekonomi*
- Medelina KUSHARWANTI, *Efektivitas Organisasi Pembangunan Desa*

7. MASALAH PEMBANGUNAN DAN KEPENDUDUKAN

- Pande Radja SILALAH, *Masalah Ketenagakerjaan di Sektor Industri*
- Sudarsono HARDJOSOEKARTO, *Pembinaan Tenaga Kerja Usia Muda di Pedesaan*
- SUKANTO, *Perspektif Mobilitas Penduduk Indonesia*
- Iwan P. HUTAJULU, *Urbanisasi dan Implikasi Sosial-Ekonominya Terhadap Migran*
- Rin Purwani BUDI, *Industri Tekstil: Tantangan Restrukturisasi*
- Sunarto NDARU MURSITO, *Hidup Bernegara Mewujudkan Kondisi Hormat atas Martabat Manusia*
- Robert A. SCALAPINO, *Suatu Perspektif dari Luar Atas Politik Asia Tenggara*

8. EMPAT PULUH TAHUN INDONESIA MERDEKA: POLITIK LUAR NEGERI

- J. Soedjati DJIWANDONO, *Empat Puluh Tahun Politik Luar Negeri Indonesia: Perubahan dan Kesenambungan*
- A.R. SUTOPO, *Indonesia antara Timur dan Barat*
- Endi RUKMO, *Politik Luar Negeri Indonesia: Diplomasi Multilateral*
- Asnani USMAN, *Indonesia, Asia Tenggara dan Selatan*
- Alfian MUTHALIB, *Indonesia dan Pasifik Barat Daya: Selandia Baru dan Papua Nugini*
- Kirdi DIPOYUDO, *Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Timur Tengah dan Afrika*

9. EMPAT PULUH TAHUN INDONESIA MERDEKA: IDEOLOGI, POLITIK DAN EKONOMI

- A.M.W. PRANARKA, *Kesinambungan, Penataan, dan Ideologi*
- BABARI, *Memantapkan Pancasila sebagai Ideologi Negara*
- M. DJADIJONO, *Pembangunan Ideologi Selama Orde Baru: Problem dan Prospeknya*
- Sarwono KUSUMAATMADJA, *Masalah dan Prospek Kelembagaan di Bidang Politik*
- Hadi SOEASTRO, *Ikhtisar Masalah Ekonomi*
- J. PANGLAYKIM, *Dalam Masa Pasca-Minyak Hendaknya Dipikirkan Konsep "Full Services" Banking*

10. KELUAR DARI KEMELUT EKONOMI

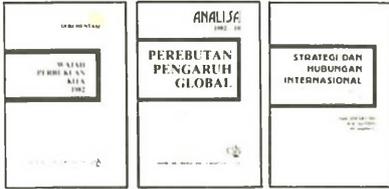
- Djisman S. SIMANDJUNTAK, *Prospek Jangka Pendek Ekonomi Indonesia*
- J. PANGLAYKIM, *Bisnis Indonesia: Keadaan Sekarang dan Prospeknya*
- Djukardi ODANG, *Prospek Perusahaan Dagang di Indonesia*
- J. PANGLAYKIM, *Singapura Menghadapi Masa Peralihan dari Pertumbuhan Ekonomi-Pesat ke Ekonomi Lambat*
- Atjep SUWARTANA, *Sumberdaya Laut Perairan Maluku dan Masalah Pengembangannya*
- Syachrinuddin SEMAN, *Pertumbuhan dan Pemerataan dalam Kaitannya dengan Ketahanan Nasional*

11. MEMPERKOKOH PERSATUAN DAN KESATUAN

- H. Anton DJAWAMAKU, *Makna Persatuan dan Kesatuan Indonesia*
- SUWARDI, *Tipe-tipe Pemikiran Keagamaan*
- Medelina KUSHARWANTI, *Kelas Menengah sebagai Kelompok Strategis*
- H. Haryo ASWICAHYONO, *Kebijakan Alih Teknologi: Suatu Tinjauan Ekonomi*
- Oct. Ovy NDOUK, *Kerangka Landasan Hukum dan Problematik Dasarnya*
- BABARI, *Pemuda dan Tantangannya*
- BABARI, *Pendayagunaan Wadah Remaja*

12. MEMAHAMI PERMASALAHAN ENERGI

- Hadi SOEASTRO, *Peranan Sektor Energi dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional*
- SUBROTO, *OPEC dalam Retrospeksi: Jalan Mana Akan Ditempuh?*
- WIJARSO, *OPEC dan Non-OPEC: Suatu Peninjauan Permasalahannya*
- Djisman S. SIMANDJUNTAK, *Model-model Pembangunan dan Kenyataan Kebijakan Ekonomi*
- Suhadi MANGKUSUWONDO, *Perkembangan Hubungan Ekonomi Indonesia-AS Akhir-akhir Ini*
- J. PANGLAYKIM, *Strategi "Asset Building" sebagai Alat Pertumbuhan Kurang Dianut Lagi oleh Sektor Perbankan Internasional?*



Untuk menunjang kegiatan studi mahasiswa, para peneliti maupun lembaga-lembaga universitas, instansi-instansi pemerintah dan umum, CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) menyediakan penerbitan berupa buku-buku dan terbitan berkala:

BUKU-BUKU

Berbagai buku baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, hasil penulisan staf CSIS mengenai strategi, ekonomi, ideologi, politik, hubungan internasional, pembangunan, hankam, sosial budaya dan lain-lain.

ANALISA

Majalah bulanan, menyajikan beberapa analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh staf CSIS maupun dari luar CSIS. Harga per eks Rp 750,— langganan setahun (12 nomor) Rp 9.000,— sudah termasuk ongkos kirim, untuk Mahasiswa Rp 6.750,—

THE INDOONESIAN QUARTERLY

Majalah triwulanan berbahasa Inggris, memuat karangan-karangan hasil pemikiran, penelitian, analisa dan penilaian yang bersangkutan-paut dengan masalah-masalah aktual Indonesia di forum nasional maupun internasional. Harga per eks Rp 1.000,—, langganan setahun (4 nomor) Rp 4.000,—, untuk Mahasiswa Rp 3.200,—

DOKUMENTASI

Kumpulan clipping berbagai surat kabar/ bulletin secara sistematis mengenai masalah-masalah tertentu.

Penerbitan-penerbitan tersebut di atas dapat diperoleh di Toko-toko Buku, atau langsung pada:

BIRO PUBLIKASI — CSIS
CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES
 Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160, Telepon 356532 s/d 356535

Untuk menunjang kegiatan pengkajian, CSIS juga menyediakan PERPUSTAKAAN dan CLIPPINGS yang terbuka untuk pencinta pengetahuan, analis dan peneliti dengan koleksi yang eksklusif, penyediaan data yang lengkap dan informasi yang cepat. Untuk keperluan tersebut hubungilah:

PERPUSTAKAAN dan BIRO INFORMASI DAN DATA — CSIS
 Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160, Telepon 356532 - 35

